

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)



OLEH :

SITI NURKHOLISAH

B111 12 257

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH
DALAM JABATAN PUBLIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

pada Bagian Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

SITI NURKHOLISAH

B 111 12 257

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABOTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/PID.SUS/2014)

Disusun dan diajukan oleh

SITI NURKHOLISAH

B111 12 257

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, 6 Juni 2016

Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S. H., M. H.
NIP. 1953 1124 1979 121 001



Dr. Hj. Haerannah, S.H., M.H.
NIP. 1966 1212 1992 042 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan I



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 196110607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **SITI NURKHOLISAH**

Nomor Pokok : **B111 12 257**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK
MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK
SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537
K/PID.SUS/2014)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi :

Makassar, April 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP. 1953 1124 1979 121 001

Pembimbing II



Dr. Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199204 2 002



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SITI NUR KHOLISAH
Nomor Pokok	: B11112257
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Prof. Dr. Ahmad Miru, SH., MH

NIP. 19610607 198601 1 003



ABSTRAK

SITI NURKHOLISAH (B11112257) Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014), dibawah bimbingan dan arahan **Bapak M Syukri Akub** selaku Pembimbing I dan **Ibu Haeranah** selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kasus Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP serta mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014).

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta serta Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan memperoleh data dan informasi dari hasil wawancara, kajian kepustakaan yaitu buku-buku, dokumen yang berhubungan dengan perkara seperti surat dakwaan, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 1) Penerapan Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537/Pid.Sus/2014 yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko Susilo adalah kurang tepat, karena tidak sesuai dengan pasal 38 KUHP. Pada pasal tersebut menegaskan bahwa lamanya pencabutan hak pada pidana penjara atau kurungan yakni minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Sedangkan dalam perkara *Aquo*, Majelis Hakim tidak menentukan lamanya pencabutan hak kepada terdakwa, dimana dapat ditafsirkan bahwa Djoko Susilo tidak dapat menggunakan hak tersebut seumur hidup meskipun telah selesai menjalani masa hukuman. 2) Parameter Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko susilo lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas nikmat, karunia, dan sifat maha pengasihnya yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu serta memperkenalkan penulis dengan cinta, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Memilih Dan Dipilih Dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi***”. Salam dan shalawat tak lupa penulis haturkan kepada rasullah Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Hukum Keperdataan, Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna dan masih butuh beberapa perbaikan hal ini tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan arahan yang tak ternilai harganya, oleh karena itu dengan

penuh rasa hormat dan kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada kedua orang tua penulis, ayahanda **Drs. H. Mahmud, S.H.,M.H.** dan Ibunda **Hj. Samsidar, S.H., M.H.**, yang telah merawat penulis dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan penulis, semoga mendapatkan tempat yang terindah disana, ibu. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga kepercayaan tersebut akan selalu penulis jaga. Terima kasih kepada kakak-kakakku Siti Nurkholidah, SH., S.E. dan Muh. Syahrul Rahmat. S.H. atas kasih sayang dan kegembiraan yang selalu kalian suguhkan. Terimakasih juga kepada bunda A. Tenri yang telah memberikan kasih sayang dan selalu menasihati penulis. Tak terlupakan kepada seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberi bantuan moril, dorongan dan semangat selama ini.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya hormati, sayangi dan banggakan:

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.,** selaku Pembantu Dekan I, **Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.,** selaku Pembantu Dekan II, dan **Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,** selaku

Pembantu Dekan III.

4. **Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing I dan **Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H.**, selaku dosen Pembimbing II selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam masa penyusunan skripsi ini.
5. Para Tim Penguji **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.**, **Bapak Imran Arif, S.H., M.H.**, **Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** Terima kasih atas semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
6. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Berserta seluruh dosen-dosen Bagian Hukum Pidana yang telah membuat penulis jatuh hati kepada Hukum Pidana. Ilmu dan Pemikiran para dosen Hukum Pidana yang dibagikan kepada penulis telah menggugah hati penulis untuk memilih Hukum Pidana sebagai jurusan yang mampu menjadikan hukum sebagai instrumen dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
7. **Bapak Prof. Dr. Abrar Saleng, S.H., M.H.** dan **Ibu Prof. Dr. A. Suryaman Muustari Pide, S.H., M.Hum.** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan

kepada penulis selama ini.

8. **Bapak dan Ibu Dosen** pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, atas seluruh ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sangat berguna untuk bekal Penulis menjalani kehidupan ke depan.
9. Para **Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan** yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan sampai perampungan skripsi ini.
10. Kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** beserta jajaran dan juga **Ketua Pengadilan Negeri Jakarta** yang telah membantu penulis pada proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
11. Keluarga Besar **Petitum 2012, Klinik Hukum ACC, ALSA LC UNHAS, ILSA, XENON, Alumni Man 2 Model Makassar**, yang telah berperan aktif menciptakan lingkungan yang baik bagi penulis.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan Apriliani Kusuma Jaya, Hj.Dian Furqani Tenrilawa, Nurul Arbiati, Pratita Nareswari Putri Wijaya, Gadis Mentari Gorhan, Hasruddin Hasan, Moch Ichwanul Reiza, S.H., dan Muh Nur Fajrin, terima kasih kalian menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama proses perkuliahan.
13. Sahabat Sehati Muh. Arham Aras, yang senantiasa membantu penulis dalam berbagai hal.

14. Segenap Keluarga Besar ***Asian Law Students Association (ALSA)***

Local Chapter Unhas, yang telah banyak membantu penulis dalam hal berorganisasi dan memberikan begitu banyak pengalaman yang tak terlupakan. Terkhusus sahabat sepengurusan Oji, Arham, Feny, Ila, Dian, Jus, Joteng, Surahmat, Olda, Rahmi, Kahfi, Icha, Yasin, Noe, Riri, Naya, Indira Waris, Eko, Afdalis, Azhima, Maipa, Dian Furqani, Destri, Fatia, Firman, Giovani, Intan, Ita Suparjo, Putri Radiyanti, Indah Alfiani, Lulu, Nisa Gayatri, Nunung, Nyoman, Fika, Ikka, Sem, Tiara, Titin, Wahyu, Iqbal, Yudha, Agus, Aswal, Akhsan, Rudi, Pratita, Anti dan Rifki yang memberi penulis pembelajaran berharga mengenai solidaritas, kerja sama dan arti dari sebuah persahabatan. Semoga kisah yang kita lalui dapat menjadi catatan indah dalam hati dan kenangan yang tidak akan terlupakan.

15. Segenap TIM MCC Pidana Piala Mahkamah Agung 2013 yang telah memperkenalkan penulis dengan dunia Hukum Acara, memberikan arti tentang semangat dan perjuangan Kak Ridwan, Kak Zul, kak Adi, Kak tadin, Kak Nurmi, kak Rini, kak Dini, kak Tari, kak Anggi, kak Molen, Kak lin, kak Dayat, kak Fiqa, kak Nita, Oji, dan Rudi. Terima kasih keluargaku atas kebersamaan dan canda tawa selama menjalani masa karantina dan lomba yang tak akan pernah terlupakan bagi penulis. *Win win Champion*.

16. Segenap TIM MCC Pidana Piala Mahkamah Agung 2013 yang

telah memperkenalkan penulis dengan dunia Hukum Acara, memberikan arti tentang semangat dan perjuangan Kak Dayat, Kak Molen, Kak Juwi, kak Adonk, kak Afdal, kak Helvi, Kak Reza, feny, oji, noe, dian, tita, afdal yanuar, irsyad, ifah. Terima kasih keluargaku atas kebersamaan dan canda tawa selama menjalani masa karantina dan lomba yang tak akan pernah terlupakan bagi penulis.

Disiplin, kerja keras, juara.

17. Sahabat terbaik penulis yang sering meluangkan waktu buat penulis untuk berbagi cerita, gadis gokil solehah, Tanti Wulandari, NurAdhayanti, Nurul Hasanah Halim, Dwi Nur Aini dan Nurul ilmy. Terimakasih atas kesetiaannya.

18. Saudara-saudaraku KKN GEL. 90 di Kecamatan Pa'jukukang, terkhusus di posko Desa Pa'jukukang, Syarif Dwi Saputra, Pratama Putra, Fismatman Ruli, Lidyawati Sabut, dana Nanda Sukma Dewi atas segala kenangan yang tidak terlupakan selama ini.

19. Saudara-saudaraku Petitum senasib seperjuangan selama menjalani masa-masa sulit pengkaderan dan perkuliahan yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman selama penulis berada di Kampus Merah.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Unhas yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT

Penulis bermunajat semoga semua kebaikan yang telah dicurahkan kepada Penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT., dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Mei 2016

Penulis

SITI NURKHOLISAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian Tindak Pidana	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
B. Tindak Pidana Korupsi	19

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	19
2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	21
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	24
C. Pidana dan Pemidanaan	28
1. Pengertian Pidana	28
2. Jenis-Jenis Pemidanaan	29
2.1. Jenis Pemidanaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	29
2.2. Jenis Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	35
3. Teori Tujuan Pemidanaan	39
D. Hak Memilih dan Dipilih sebagai Hak Asasi Manusia	44
E. Jabatan Publik	49
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Lokasi Penelitian	53
B. Jenis dan Sumber Data	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55

A. Kronologi Kasus Djoko Susilo	55
B. Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Kasus Djoko Susilo ditinjau dari Pasal 38 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014)	70
C. Pertimbangan Hakim Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014)	80
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	xv

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Atribut negara hukum yang disandang negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD 1945 adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*maachtstaat*). Sebagai negara hukum, tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.

Sejak bergulirnya reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korupsi merupakan masalah serius, yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat naun perbuatan ini akan menjadi budaya.

Akhir-akhir ini korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi disektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai

kejahatan jabatan (*occupational crime*).¹ Di sektor publik ini bentuk korupsi yang marak terjadi adalah penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus Tipikor, sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku Tipikor. Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman pidana ternyata belum terlaksana dengan cukup efektif, karena korupsi yang dilakukan pejabat publik dan tokoh politik belum juga menyurut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *anti-corruption clearing house*, total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2004-2015 adalah, penyelidikan sebanyak 714 perkara, penyidikan 437 perkara, penuntutan 353 perkara, inkracht 298 perkara, dan yang dieksekusi mencapai angka 315 perkara. (Data Per 30 September 2015).²

¹ *Occupational Crime* atau kejahatan jabatan adalah pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah melakukan perbuatan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Lihat dalam Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 hlm. 14

² <http://acch.kpk.go.id/statistik-tindak-pidana-korupsi> diakses pada tanggal 19 Desember 2015

Seiring dengan perkembangan kasus korupsi yang kian memuncak, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk upaya tersebut beragam seperti, upaya pencegahan (*preventif*), upaya penindakan (*kuratif*), upaya edukasi.

Dalam menjalankan upaya penindakan, khususnya dalam hal pemidanaan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan berbagai terobosan dalam hal penanganan Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya yaitu, penuntutan maksimal pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan menuntut membayar uang ganti rugi sebesar-besarnya kepada Negara sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski upaya pemberantasan korupsi dengan menerapkan pidana tambahan telah gencar dilakukan, hingga saat ini belum ada indikasi penurunan tingkat kasus korupsi, justru meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif. Lebih parahnya lagi, korupsi saat ini sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institutional. Dengan

demikian, praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.³

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan baru dalam hal pemberantasan kasus korupsi, yakni dengan menuntut pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu itu salah satunya berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.

Salah satu kasus korupsi yang menerapkan pidana tambahan kepada pelaku korupsi adalah kasus korupsi pengadaan *driving* simulator uji klinik pengemudi roda dua (R-2) dan roda empat (R-4) yang melibatkan salah satu perwira tinggi POLRI yaitu Djoko Susilo.

Djoko Susilo adalah terpidana kasus korupsi pertama yang mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Padahal pidana tambahan tersebut

³ Evi Hartanti *Op.cit* Hal 3

sudah cukup lama dimuat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perspektif hak asasi manusia yang merupakan nilai dasar dan telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pencabutan hak pilih aktif dan pasif menjadi polemik yang masih banyak dipertanyakan oleh beberapa pihak. Pencabutan hak tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan publik sejatinya bisa menjadi alat penjeratan bagi terpidana korupsi sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik agar tidak menjadi calon pelaku tindak pidana korupsi yang semakin merajalela di berbagai institusi Negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik, untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sehingga penulis memilih judul “Tinjauan Yuridis terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kesesuaian penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kasus Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kasus Djoko Susilo dengan Pasal 38 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)

3. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas

pengetahuan dan menambah referensi khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan secara praktis

Dalam penegakan hukum diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai para pengambilan kebijakan para penegak hukum khususnya dalam menangani masalah pencabutan hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *straafbaarfeit*, di dalam KUHPidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *straafbaarfeit* itu sendiri. *Straafbaarfeit* merupakan istilah Belanda yang berasal dari kata *straafbaar*, artinya dapat dihukum.⁴

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tiga istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf*, diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang lebih luas dari kata perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi

⁴ P.A.F., Lamintang 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung, hlm. 72.

penting dalam hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun aktif).⁵

Untuk istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan kita walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*bandelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit*, itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan /diisyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia,

Simons , guru besar ilmu hukum pidana di Universitas utrecht Belanda, memberikan terjemahan *strafbaar feit*, sebagai perbuatan pidana. Menurutnya, *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁶ Selain itu, Simons juga merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

⁵ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.69.

⁶ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

Sudarto⁷ mengatakan : *Strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang dimaksud juga sebagai istilah tindak pidana, yaitu:

- a. Peristiwa pidana (UUDS 1950 Pasal 14 ayat (1)).
- b. Perbuatan pidana (UU Darurat No. 1 tahun 1951, UU mengenai tindak sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat 3b).
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (UU Darurat No. 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie tijdelijke by zondere strafbepalingen S. 1948 – 17* dan UU RI (dahulu) No. 8 tahun 1948 Pasal 3).
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (UU Darurat NO. 1951, tentang Penyelesaian perselisihan perburuhan, Pasal 19, 21, 22).
- e. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129).
- f. Tindak pidana (UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 dan sebagainya).

⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, Hlm 23.

g. Tindak pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka permasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan, Pasal 1).

Dari berbagai peraturan perundang-undangan di atas, dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang pada saat itu masih memakai istilah tindak pidana yang berbeda-beda dalam setiap undang-undang. Dari berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting menurut Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.⁸

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*”, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaardfeit*” tersebut .

Strafbaar feit diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat didalamnya.⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 12.

⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

1. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu: "pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan-kepentingan hukum"¹⁰
2. Menurut Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain".¹¹
3. Menurut E.Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut sebagai delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-negatif* maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹²
4. Vos memberikan definisi *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.¹³

Selanjutnya Hazewinkel Suringa terhadap istilah *strafbaarfeit* telah membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum

¹⁰ P.A.F., Lamintang 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, : Bandung, 1997 hlm. 182.

¹¹ *Ibid*, hlm. 184.

¹² *Ibid*, hlm. 185.

¹³ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 225.

sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹⁴

Van Hattum berpendapat bahwa istilah *strafbaar feit* secara eksplisit haruslah diartikan sebagai suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum atau *suatu feit terzake van hetwelk een person strafbaar is*.¹⁵

Berdasarkan uraian pendapat dari pakar hukum diatas, penulis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Loc. Cit.*, hlm. 181 - 182

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 184

itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Di muka telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoretisi yang telah dibicarakan di muka, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. yang dilarang; (oleh aturan hukum);
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah inkongkrito orang yang

¹⁶ Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.79.

melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.¹⁷

Dari rumusan R.Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundangan-undangan.

Sedangkan menurut EY.Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat Melawan Hukum (dan tindakan);

¹⁷ *Ibid*, hlm.79.

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁸

Dengan demikian, Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka serta unsurnya dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tersebut diberi atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.¹⁹

¹⁸ EY.Kanter dan R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 211.

¹⁹ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 100.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).²⁰

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:²¹

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggungjawab
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaaf.

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 38.

²¹ *Ibid.*, hlm. 43

perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/sipembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan

objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²²

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Fockema Andreae²³ kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* (*Webster Student Dictionary: 1960*). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua.

Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, corrupt*, : Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu Korupsi.

Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁴

Istilah korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam

²² Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.82-83.

²³ Kamus Hukum, Fockema Andreae. (Bandung:Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina cipta

²⁴ Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan International*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm 5.

Kamus Umum Bahasa Indonesia : “Korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.²⁵

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” yaitu gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara, menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan lainnya.

Menurut Victor M. Situmorang (Khardiyanti Habri, 2010 :10)

“korupsi secara umum dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sudatu badan, yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau daerah atau keuangan suatau badan,yang menerima bantuan keuangan Negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya”

Definisi lain dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002:2) bahwa :

“secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kata kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah penyuapan”

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Susarto (Khardiyanti Habri, 2010 :11) bahwa :

“istilah korupsi di beberapa Negara juga dipakai untuk menunjukkan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.1976.

dikaitkan dengan ketidakjujuran seorang dibidang keuangan”.

Menurut perspektif hukum Indonesia, definisi korupsi secara gambling telah dijelaskan dalam tiga belas buah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara korupsi.

2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Peraturan perundang di Indonesia tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah Pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 225, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP.²⁶ Pasal-pasal tersebut masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu ada

²⁶ Moeljatno, *KUHP* (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), cet. Ke-20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

peraturan-peraturan lain mendukung atau melengkapi KUHP tersebut.

Pada periode penguasa perang militer tanggal 9 April 1957 keluar peraturan KSAD Nomor PRT/PM-06/1957 Tentang Korupsi yang ada di lingkungan militer, tetapi peraturan tersebut dirasa juga belum efektif, kemudian dilengkapi dengan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-06/1957, tanggal 27 Mei 1957 tentang Pemilikan Harta Benda., kemudian keluar lagi Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-001/1957, tanggal 1 Juni 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang Hasil Korupsi. Ketiga peraturan tersebut sebagai dasar kewenangan kepada penguasa militer untuk dapat menyita dan merampas barang-barang hasil korupsi. Tida peraturan dilingkungan militer tersebut kemudian dilengkapi lagi dengan keluarnya Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958, tanggal 16 April Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

Kemudian tanggal 1 Januari 1960 pemerintah memberlakukan Undang- Undang Nomor 14/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudia keluar Kepres No 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967 Tentang Pembentukan TPK (Tim

Pemberantasan Korupsi). Undang- Undang yang lebih jelas tentang tindak pidana Korupsi adalah setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 berlaku sampai periode reformasi. Pada periode reformasi, pemerintah, dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan sejak saat itu Undang-Undang No 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi. Didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari pasal 2 sampai 20. Kemudian pada Bab IV mulai Pasal 25 sampai Pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan materilnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁷

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni penjelasan Pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap, kemudian

²⁷ Tim Pustaka Merah Putih, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Galangpres, Yogyakarta, 2007

ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi yang jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, terakhir dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Defenisi Tindak pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

mengelompokkan 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yaitu²⁸

;

1. Korupsi yang merugikan keuangan Negara

Perbuatan yang merugikan negara dalam UU PTPK terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Selanjutnya yang kedua yaitu menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

²⁸ Surahmin dan Suhandi Cahaya, Strategi dan Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 16-17

2. Korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap

Perbuatan suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 13, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d UU PTPK.

3. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, yaitu Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c UU PTPK.

4. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan

Dalam UU PTPK, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum pada pasal 12 huruf e UU PTPK, kemudian yang kedua yaitu Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

5. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Korupsi jenis ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu Pasal 7 ayat 1 huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c d. Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h UU PTPK.

6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Korupsi yang berkaitan dengan pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut ;

"Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya."

7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12b dan Pasal 12c UU PTPK.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *starf* (bahasa belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Menurut Adami Chazawi²⁹, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai: Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh

²⁹ Adam Chazawi, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menurut Soedarto³⁰, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimasukkan agar orang itu menjadi jahat. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum lain. Ini sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi dan upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai.

2. Jenis-Jenis Pidana

2.1. Jenis-jenis Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Hukum Pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni³¹ :

³⁰ Nini Suparni, 2007. Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 11.

³¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 107.

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

Di dalam Negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan fiat eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi.

b. Pidana Penjara

Menurut Andi Hamzah, menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.

Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP yang berbunyi:

- 1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara Pidana Mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (concursum), pengulangan (residive) atau Karena yang telah ditentukan dalam pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

c. Kurungan

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat

ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-hak tertentu

Pada dasarnya para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah menolak lembaga pencabutan hak-hak, melainkan mereka hanya menginginkan agar jenis-jenis hak yang dapat dicabut itu hanyalah hak-hak, yang menurut sifat dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu, ternyata telah disalahgunakan oleh orang tersebut. Menurut pendapat mereka, orang seperti tidak pantas untuk

diberikan hak yang ternyata telah digunakannya secara salah.³²

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :³³

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anaknya sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukan pencabutan hak, pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :³⁴

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pidana pencabutan sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

³² P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika; Jakarta, hal 87

³³ Kumpulan Kitab Undang- Undang hukum KUH Perdata, KUH P, WIPRESS, hlm. 444

³⁴ *Ibid*, hal 444

Pencabutan hak tersebut mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :³⁵

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam

³⁵ *Ibid* hlm 445

bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:³⁶

“apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

2.2. Jenis-Jenis Pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang PTPK, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut³⁷ :

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Evi Hartanti, *Op.cit*, Hlm.12

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

b. Pidana Penjara

Dalam hukum pidana korupsi terdapat 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan, yakni pidana penjara dan pidana denda. Dalam penerapannya sistem penjatuhan pidana pokok tersebut terbagi 2 (dua) macam, yakni penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, dimana antara pidana penjara dan pidana denda wajib dijatuhkan secara serentak. Sistem imperatif-kumulatif ini diancamkan pada tindak pidana korupsi yang palit berat. Adapun yang kedua yaitu

penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara 2 (dua) jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Mengenai sifat fakultatif ini, jika dibandingkan dengan KUHP, sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini dirumuskan pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 UU PTPK.

Selanjutnya mengenai ancaman minimum dan maksimum, dalam UU PTPK, pidana pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHP dimana dalam pidananya hanya diatur ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum.

c. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

d. Gugatan Perdata kepada Ahli Warisnya

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan

kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

e. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Teori tujuan Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagidalam tiga kelompok teori, yaitu :

1. Teori absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan, Menurut Thomas Aquinas

pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu :

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.³⁸

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Kant di dalam bukunya "*Philosophy of law*" sebagaimana dikutip Muladi³⁹ mengatakan " Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus

³⁸ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm.145.

³⁹ Barda Nawawi Arief, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.

dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Salah seorang tokoh penganut teori absolut yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “Negation der negation” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Pendapat sarjana tersebut diatas didasarkan pada “*the Philosophy of vengeance*” atau filsafat pembalasan dalam di dalam mencari dasar pembenaran dari pembedaan.

Berkaitan dengan teori absolut (*retribution*), Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut :

- b. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- c. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- e. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan sipelanggar;
- f. Pidana melihat kebelakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki mendidik atau memasyarakatkan. Kembali si pelanggar

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjut teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan

kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.⁴⁰

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Mengenai teori relatif ini Andenaes dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*) karena salah satu tujuannya adalah melindungi kepentingan masyarakat.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pembedaan seperti dikemukakan di atas, yakni teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigingstheorie*). Pelopor teori ini adalah Rossi (1787 - 1884). Teori Rossi disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :⁴¹

⁴⁰ Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, Armico, Bandung, 1985, hlm.153.

⁴¹ Adami Chazawi, 2008, *Op.Cit.*, hlm.166.

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan taat tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

D. Hak memilih dan Dipilih sebagai Hak Asasi Manusia

Sejak lahirnya NRI tahun 1945 bangsa ini telah menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Sikap tersebut Nampak dari Pancasila dan UUD 1945, yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan HAM warga Negara. Sehingga pada praktek penyelenggaraan negara, perlindungan, atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak *constitusiona*l warga negara (*the citizen's constitusiona*l rights) dapat terlaksana. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjamin hak dipilih secara tersurat dalam UUD NKRI Tahun 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3);. Sementara hak memilih juga diatur dalam

Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD NRI Tahun 1945. Perumusan pada pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama, dan keturunan. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dan implementasi hak dan kewajiban pun harus bersama-sama. Ketentuan UUD NKRI Tahun 1945 diatas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam pemilihan umum di Indonesia.

Dalam Undang- Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, Hak politik warga Negara diatur dalam bab hak turut serta dalam pemerintahan, yakni diatur dalam Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) serta pasal 44 yang berbunyi sebagai berikut⁴² :

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang

⁴² Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. No. 39 tahun 1999. LN no 165 Tahun 1999. TLN. No 3886. Ps. 43 (1), (2), (3) dan Ps 44.

dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari semua konsepsi perlindungan hak politik sebagaimana yang telah dibahas diatas, maka secara general, hak politik yang dilindungi instrument hukum international maupun hukum nasional Republik Indonesia mencakup hak-hak sebagai berikut :

1. Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya.
3. Hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
4. Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik dalam pemerintahan.

Hak pertama yakni untuk hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum tercermin dalam bentuk partisipasi masyarakat untuk ikut dalam memberikan suara dalam pemilu dan mencalonkan diri menjadi calon pejabat public dalam pemilihan umum. Khusus hak politik untuk dipilih merupakan ranah politik praktis dimana jabatan-jabatan politik tersedia antara lain : Jabatan Presiden dan wakil presiden yang pemilihannya berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Jabatan Gubernur, Bupati, Wali kota sebaaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Terakhir Jabatan Anggota DPR, DPD dan DPRD yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, Undang-Undang mengatur pula tentang pembatasan atas hak-hak tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban*

umum dalam suatu masyarakat demokratis ”. berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, jelas menunjukkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, dimungkinkan adanya pembatasan. Pembatasan yang demikian ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam Undang-Undang, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut maka tidak dimungkinkan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia. Kerangka hukum yang demikian ini perlu untuk dipahami secara bersama-sama dalam rangka memaknai “hak” yang telah diakui dan diatur secara hukum di Indonesia. Kondisi demikian tersebut diatas, apabila mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran hukum terhadap jaminan hak memilih dan dipilih yang melekat pada warga negara Indonesia. Adanya ruang untuk melakukan pembatasan tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, melahirkan pengaturan bahwa hak memilih dan dipilih tersebut dimungkinkan untuk tidak melekat pada semua warga negara Indonesia. Artinya, hak memilih tersebut diberikan pembatasan-pembatasan sehingga warga negara yang diberikan jaminan memiliki hak dipilih dan memilih

tersebut benar-benar merupakan warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan⁴³

E. Jabatan Publik

Istilah Pejabat Publik akan mengundang berbagai pendapat atau pandangan mengenai apa itu pengertian Pejabat Publik. Dari berbagai pandangan tersebut, hanya akan dikemukakan pendapat dan pandangan menurut perspektif hukum. Perspektif hukum yang dimaksudkan adalah bagaimana para sarjana hukum, dan ketentuan hukum positif nasional kita memberi pengertian tentang apa itu Pejabat Publik.

Pejabat Publik terdiri dari dua suku kata, yaitu Pejabat dan Publik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBIH) memberi pengertian Pejabat dengan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan) . Sementara, istilah Publik diartikan dengan orang banyak (umum) . Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Pejabat Publik adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting sebagai pimpinan yang mengurus kepentingan orang banyak. Dengan defenisi yang demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai Pejabat Publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: (i) bahwa dia adalah pegawai

⁴³ <https://reazaoktafiansyah.wordpress.com/2014/04/19/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu> diakses pada 06 Desember 2015 pukul 21.21 WITA

pemerintah; (ii) menjabat sebagai pimpinan; dan (iii) bahwa tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.

Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah "Pejabat Publik" memiliki makna yang similar (sama) dengan istilah "Pejabat Tata Usaha Negara". Oleh karenanya, perlu dikemukakan pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi *law creating function and law applying function* adalah pejabat tata usaha negara. Artinya, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat publik.

Pandangan Hans Kelsen tersebut juga mensyaratkan 3 (tiga) hal, yaitu : (i) adanya jabatan; (ii) adanya fungsi pembentukan norma hukum negara yang melekat pada jabatan tersebut; dan (iii) selain fungsi pembuatan norma hukum negara, juga melekat fungsi pelaksanaan norma hukum negara pada jabatan tersebut. Pengertian jabatan disini barangkali dapat dirujuk sebagaimana dikemukakan di atas.

Dalam menggali pengertian yang lebih mendalam tentang Pejabat Publik, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara, perlu dikemukakan bagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (UU No. 5 Tahun

1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004) tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU No. 8 Tahun 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, pada Pasal 1 angka 2 menyatakan : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan yang dimaksudkan disini adalah institusi atau organ, sementara pejabat adalah orang perorangan yang menduduki jabatan tertentu. Jika dicermati bunyi ketentuan tersebut, bahwa Pejabat Tata usaha Negara itu bukan hanya pegawai pemerintah saja, akan tetapi siapapun, institusi atau orang perorang, yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan atas amanat dari peraturan perundang-undangan, dapat disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

UU No. 8 Tahun 2008 memberi peristilahan yang lebih tegas dan jelas, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 : Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Sementara, yang dimaksud badan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang yang sama : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Dari berbagai pandangan yang dipaparkan mengenai pengertian Pejabat Publik, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan "Pejabat Publik" adalah orang yang menduduki jabatan pada organ pemerintahan atau nonpemerintahan, yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, dimana untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut digunakan dana yang bersumber dari keuangan negara (APBN dan/atau APBD), apakah sebagian atau seluruhnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian pada Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung, baik data tersebut diperoleh secara langsung, maupun tidak langsung. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data yang cukup lengkap dan memadai untuk disajikan kedalam bentuk informasi yang akurat yang dibutuhkan didalam penelitian ini. Selain itu penulis juga akan melakukan penelitian diberbagai perpustakaan yang berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

B. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung melalui wawancara dengan Jaksa dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari beberapa instansi, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penelitian ini disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan wawancara secara langsung maupun tidak langsung untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

2. Studi Dokumen

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data berdasarkan dokumen yang berhubungan dengan perkara, seperti surat dakwaan, putusan hakim, dll kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus Djoko Susilo

Sebelum penulis membahas mengenai penjatuhan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan, maka terlebih dahulu penulis menguraikan kronologi terjeratnya Djoko Susilo dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai berikut :

Pada Agustus 2010, Budi Susanto mengadakan pertemuan dengan Sukotjo Sastronegoro Bambang di Starbucks Coffee-TIS-Tebet Jakarta Selatan yang membicarakan bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2010 di Korlantas POLRI akan diadakan pekerjaan Pengadaan Optimalisasi *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2)* sebanyak 1000 unit dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4)* sebanyak 1000 unit yang akan dilaksanakan dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2010 dengan menggunakan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan ia meminta Sukotjo agar bersedia mengerjakan penyediaan barang-barang yang dimaksud. Namun Sukotjo menyampaikan bahwa perusahaannya tidak sanggup dengan alasan keterbatasan tempat, pegawai, dan dana yang terbatas. Kemudian Budi hanya meminta agar Sukotjo cukup menyediakan tempat dan pegawainya,

sedangkan dana akan ia sediakan. Di Kantor Korlantas Polri mereka berdua kembali bertemu di ruangan kerjanya Teddy Rusmawan, dalam kesempatan tersebut Sukotjo menyatakan bahwa ia bersedia membantu Budi Susanto terkait pengadaan tersebut.

Sekitar bulan September 2010, Budi Susanto meminta Sukotjo agar membantu Ni Nyoman Suartini dan Wandi Rustiwan, membuat usulan pengajuan anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Optimalisasi *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2)* sebanyak 1000 unit dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4)* sebanyak 1000 unit di Korlantas Polri TA 2010. Namun karena PNBPN di Korlantas Polri TA 2010 tidak memenuhi target, maka yang terealisasi hanya 100 unit untuk R-2 dan 50 unit R-4. Sekitar bulan Oktober 2010, Sukotjo menemui Darsian (bag. Keuangan Mabes Polri) atas permintaan Budi Susanto, untuk meminta informasi mengenai jumlah dana yang akan dialokasikan terkait Pengadaan Optimalisasi *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2)* dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4)* TA 2011 dan kemudian memberikan uang Rp50.000.000,00 kepada Darsian serta staffnya sebesar Rp15.000.000,00 Sebelum dilakukan penyusunan pagu anggaran definitif Korlantas Polri TA 2011, dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Inspektur Jendral Polisi Drs. Djoko Susilo S.H., M.Si. yang pada saat itu memerintahkan para Kasubbag, para Kasubid di Bagian Renmin (Perencanaan Administrasi), dan Ni Nyoman Suartini bersama dengan Subbag Renmin dibantu oleh Sukotjo melakukan

penghitungan harga satuan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2)* dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4)* TA 2011 mengacu pada Pagu Anggaran TA 2010.

Selanjutnya hasil perhitungan tersebut dipaparkan dalam rapat yang dipimpin oleh Didik Purnomo selaku Wakil Ketua Korlantas Polri dan disahkan oleh Djoko Susilo dalam bentuk Rencana Kegiatan Anggaran Kementrian/ Lembaga (RKA-KL) Korlantas Polri dan Kemudian RKA-KL tersebut dikirimkan ke Asrena Polri untuk diteruskan ke Direktorat Jendral Anggaran Kementrian Keunagan RI guna mendapatkan Pengesahan menjadi Pagu Anggaran Defenitif Korlantas Polri TA 2011. November 2010, Budi Susanto terkait pengadaan TA 2011 tersebut mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp.101.000.000.000,00 ke Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Gunung Sahari menggunakan nama PT CMMA dengan menjaminkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan *Drivving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2)* dan *Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4)* TA 2011 dan tanggung renteng dengan jaminan atas fasilitas kredit yang sedang berjalan kr Bank BNI di SKM Jakarta Gunung Sahari. Padahal saat pengajuan kredit tersebut pekerjaan maupun SPK pengadaan tersebut belum ada. Kemudian pihak ank melakukan verivikasi kebenaran data yang dijadikan permohonan kredit kepada Djoko Susilo selaku pejabat yang berkompeten atas pengadaan tersebut dan hal tersebut dibenarkan oleh Djoko Susilo, padahal Rencana Umum Anggaran belum ditetapkan

dan belum diumumkan serta belum ada pengesahan Pagu Anggaran Defenitif Korlantas Polri TA 2011.

Tanggal 29 Desember 2010, setelah mendapatkan kepastian kebenaran data pihak Bank melalui surat menyetujui pemberian KMK dengan nilai maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 kepada Budi Susanto. Pada bulan Desember 2010 pagu anggaran DIPA Korlantas ditetapkan dalam APBN Murni TA 2011 yang di dalamnya terdapat penganggaran kegiatan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi. Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut Djoko Susilo membentuk panitia Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simultaor Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 yang diketuai oleh Teddy Rusmawan dengan anggota Ni Nyoman Suartini. Setelah panitia tersebut terbentuk Djoko Susilo diruang kerjanya bersama Budi Susanto memanggil Teddy Rusmawan agar menunjuk Budi Susanto menjadi pelaksana dalam pengadaan TA 2011.

Bulan Januari 2011 Djoko Susilo memimpin rapat yang diikuti oleh Teddy Rusmawan, Budi Setyadi (Kabag Renmin), Endah Purwaningsih (Kasubbag Ren dan anggota panitia pengadaan), Heru Trisasono (Kasubbag ADA dan anggota panitia pengadaan), Ni Nyoman Suartini (anggota panitia pengadaan), dan Wandy Rustiwan (anggota panitia pengadaan) yang membahas pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011. Pada kesempatan tersebut Djoko Susilo secara bertentangan dengan

hukum memerintahkan Budi Setyadi bahwa produk milik Budi Susanto sebagai penyedia barang tidak bagus dan sebaiknya spesifikasinya mengacu Driving Simulator yang ada di Singapura, sehingga Djoko Susilo memerintahkan untuk menyiapkan tim studi banding ke Singapura.

Tanggal 12 Januari 2011, sebagai tindak lanjut dari persetujuan pemberian KMK Rp.100.000.000.000,00 pihak bank BNI SKM Jakarta Gunung Sahari memberitahukan kepada Budi Susanto melalui surat bahwa telah mentransfer uang sejumlah Rp.35.000.000.000,00 ke rekening PT ITI di Bank BNI KLN Cijeruk Bandung dengan Direktur Sukotjo S. Bambang. 13 Januari 2011, Budi Susanto memerintahkan Sukotjo S. Bambang bersama Ijay Herno membawa uang sebesar Rp.2.000.000.000,00 yang dibungkus 1 buah kotak kardus ke kantor Korlantas Polri untuk diberikan kepada Djoko Susilo namun beliau tidak berada di tempat sehingga uang tersebut dititipkan kepada sekertaris pribadinya Erna. Selanjutnya Sukotjo S. Bambang menghubungi Budi Susanto bahwa paket sudah diberikan kepada Djoko Susilo.

Tanggal 14 Januari 2011, Atas biaya Budi Susanto, ia bersama Teddy Rusmawan, Heru Trisasono, dan Tejo berangkat ke Singapore Safety Driving Center (SSDC) untuk melihat contoh alat Driving Simulator di Singapura berdasarkan perintah Djoko Susilo. Saat pelaksanaan studi banding di Singapura, Teddy Rusmawan meminta uang sebesar Rp.7.000.000.000,00 kepada Budi Susanto untuk disetorkan ke rekening PRIMKOPPOL Ditlantas Polri. Setelah kunjungan ke SSDC, Teddy

Rusmawan melaporkan kepada Djoko Susilo bahwa anggaran di Korlantas Polri tidak akan mencukupi apabila dibandingkan dengan harga Driving Simulator dari Singapura. Berdasarkan hal tersebut kemudian Djoko Susilo meminta Budi Susanto dan Teddy Rusmawan agar spesifikasi teknis Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 disamakan dengan pengadaan TA 2010. Selanjutnya Budi Susanto bersama-sama dengan Djoko Susilo melakukankesepakatan tentang Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 yang nilainya tidak sama persis dengan HPS TA 2010 dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan pihak luar Korlantas.

Demi mewujudkan kesepakatannya tersebut Budi Susanto meminta S. Bambang bersama dengan Ni Nyoman Suartini menyusun HPS yang dimaksud dengan menggelembungkan harganya. HPS yang disusun tersebut selanjutnya oleh Teddy Rusmawan diserahkan kepada Didik Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk ditandatangani dan ditetapkan sebagai HPS Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011. Tanggal 24 Januari 2011, Panitia Pengadaan Korlantas Polri mengumumkan adanya Pelelangan Umum Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 dengan HPS Rp.55.300.000.000,00 dan Pelelangan Umum Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 dengan HPS Rp.143.500.000.000,00 dalam upaya meloloskan PT CMMA sebagai

pemenang lelang dengan seolah-olah dilakukan pelelangan secara terbuka, maka pada sekitar akhir bulan Januari 2011, Budi Susanto atas sepengetahuan Teddy Rusmawan, memerintahkan Sukotjo S. Bambang agar menyiapkan perusahaan-perusahaan yang akan dijadikan sebagai peserta pendamping dalam proses pelelangan tersebut.

Sukotjo S. Bambang meminta bantuan Warsono Sugantoro alias Jumadi untuk menyiapkan perusahaan-perusahaan yang dapat dipinjam namanya sebagai peserta pendamping untuk mengikuti lelang pengadaan tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp.20.000.000,00 untuk mengatur agar PT CMMA menjadi pemenang, maka dalam pelaksanaan proses lelang tersebut sudah diatur agar PT CMMA yang dinyatakan lulus administrasi dan teknis. 17 Februari 2011, Oleh Panitia Pengadaan PT CMMA ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan tersebut. Kemudian Teddy Rusmawan melaporkan pada Djoko Susilo bahwa pada saat proses pelelangan, tidak ada perusahaan-perusahaan lain yang memasukan dokumen penawaran kecuali perusahaan-perusahaan yang sudah dikondisikan oleh Budi Susanto. Oleh karena nilai pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 lebih dari Rp.100.000.000.000,00 maka yang berwenang menetapkan pemenang lelang adalah KAPOLRI selaku Pengguna Anggaran. 25 Februari 2011, Didik Purnomo (PPK) dan Budi Santoso (PT CMMA) menandatangani SPJB pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dengan nilai

kontrak Rp.54.500.000.000,00 untuk 700 unit dengan harga satuan Rp.77.800.000,00

Tanggal 5 Maret 2011, Setelah dilakukan perhitungan dengan mengurangi body dan hidrolic serta penawaran harga oleh Budi Santoso, Sukotjo S. Bambang memaparkan harga Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 mencapai Rp.80.000.000,00 per unit dan untuk R-2 sebesar Rp.43.000.000,00 per unit, keduanya sudah termasuk biaya instalasi, training dan perawatan tetapi tidak termasuk biaya pengiriman. 14 Maret 2011, Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA mengajukan pencairan anggaran untuk pembayaran untuk Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 Kepada Kolantas Polri sebesar 100%, meskipun pekerjaan pengadaan belum diselesaikan seluruhnya. Menindaklanjuti pengajuan pencairan anggaran dari Budi Susanto tersebut Ni Nyoman menghubungi Murtono dan mengatakan "Pak Murtono nanti akan dibuat BAPPM dan BAPPB R-2. Tolong nanti segera ditandatangani karena ini perintah pimpinan."

Kemudian Murtono menjawab "Saya akan periksa dulu. Ikuti saja ketentuan supaya sama-sama aman." Beberapa saat kemudian Wahyudi selaku staf dari Ni Nyoman Suartini datang ke ruangan Murtono mengantarkan Draft BAPPM dan BAPPB yang isinya menerangkan sebanyak 700 unit Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 dalam kondisi siap dioperasikan, namun Murtono tidak mau menandatangani BAPPM dan BAPPB tersebut dikarenakan belum

melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap barang pengadaan tersebut. 15 Maret 2011, Budi Susanto ke ruangan Legimo di Binsar Korlantas Mabes Polri dan mengatakan: "Pak lek, saya diperintah Kakor ni, suruh cepet." Menindaklanjuti permintaan dari Budi Susanto tersebut, Legimo melakukan verifikasi pada dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011, dan setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut diserahkan Legimo kepada Budi untuk dilengkapi dengan mengatakan "Ini belum lengkap, berita acaranya belum ada... Tolong dilengkapi." 16 Maret 2011, dokumen pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 yang diserahkan Legimo kepada Budi pada tgl 15 Maret 2011 untuk dilengkapi sudah berada di meja Legimo, dan di atas dokumen tersebut terdapat selembar kertas yang bertuliskan nomor atau angka. Kemudian pada siang harinya Budi Susanto ke ruangan Legimo dan Legimo menanyakan lembaran kertas tersebut berasal dari mana, kemudian Budi Susanto menjawab bahwa nomor tersebut dari Ni Nyoman.

Setelah mengetahui nomor tersebut dari Ni Nyoman, Legimo menelpon Ni Nyoman dan mengatakan: "Man mana berkasnya? kok Cuma catatan nomor dan tanggal saja?" Kemudian dijawab oleh Ni Nyoman dengan mengatakan "Sebentar pak lek, itu nomor dan tanggalnya dulu. berkasnya masih diproses". Selanjutnya dokumen

pengajuan pencairan anggaran tersebut yang belum lengkap tapi sudah ada nomornya tidak ditindaklanjuti oleh Legimo karena menunggu berita acara yang masih dalam proses. Namun pada sore harinya Budi Susanto mendesak dokumen tersebut untuk segera diselesaikan, Legimo menelepon Djoko Susilo dengan mengatakan: "Mohon ijin pak, ini berkas Driving Simulator R-2 masih belum lengkap ... mohon petunjuk." Atas pertanyaan dari Legimo tersebut Djoko Susilo menjawab "Yasudah... sampean bantu saja."

Selanjutnya karena sudah ada perintah dari Djoko Susilo untuk mencairkan dana anggaran pekerjaan pengadaan yang diajukan oleh Budi Susanto tersebut, kemudian Legimo menindaklanjuti perintah dari Djoko Susilo dengan memproses pengajuan pencairan anggaran. Sekitar pukul 16.00 WIB, Djoko Susilo dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku KPA atau kedudukannya selaku Kepala Korps Lalulintas Polri menandatangani pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 berupa 1 lembar asli Surat Perintah Membayar dengan nilai nominal Rp.48.760.186.364,00. Setelah dokumen pencairan anggaran tersebut disetujui dan ditandatangani oleh Djoko Susilo, kemudian Budi menanyakan kepada Legimo apakah sudah selesai dan Legimo memberitahu bahwa dokumen tersebut sudah selesai. Selanjutnya Budi meminta Legimo segera merealisasikan perintah Djoko Susilo mencairkan anggaran atas pengadaan tersebut.

Tanggal 17 Maret 2011, dilakukan pencairan dana anggaran pembiayaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 sebesar 100% yaitu Rp.48.760.186.364,00 setelah potong pajak yang selanjutnya ditransfer ke rekening PT CCMA, padahal pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 belum selesai 100%. Seminggu setelah pencairan tersebut, Wahyudi staf dari Budi Santoso menitipkan 4 kardus yang berisi uang Rp.30.000.000.000,00 kepada Legimo untuk diberikan kepada Djoko Susilo. Tanggal 24 sampai dengan 25 Maret 2011, 18 April 2011, serta tgl 6 Mei 2011, Tim Pemeriksa dan penerima barang yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah dari Djoko Susilo selaku Kepala Korlantas Porli dan KPA melakukan pengecekan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 ke lokasi perakitan pembuatan spare part dan gudang penyimpanan PT CMMA di Bandung, dan hasil pengecekan barang tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Djoko Susilo dan Didik Purnomo (PPK) dengan dibuat BAPPM tgl 6 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Murtono, Wishnu Buddhaya, Edith Yuswo Widodo, Wahyudi, Suyatim selaku Tim Pemeriksa dan Penerima Barang dan Didik Purnomo selaku PPK.

Selanjutnya BAPPM tersebut diajukan kepada Legimo untuk dimintakan nomor, tetapi Legimo tidak mau memberikan nomor untuk BAPPM tgl 6 Mei 2011 tersebut karena sebelumnya sudah ada Berita Acara yang dibuat yaitu BAPPM tgl 14 Maret 2011 dan berita acara penyerahan pengadaan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-

2 Korlantas Polri TA 2011 Tgl 15 Maret 2011. Sekitar bulan Juni 2011, Teddy Rusmawan memberitahu Wishnu B. bahwa Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 yang telah dinyatakan lengkap oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pada tgl 6 Mei 2011 sebanyak 700 unit, tetapi kotak untuk menyimpan barang tersebut yang sudah jadi banyak yang kosong dan tidak ada isinya. 16 Juni 2011 Djoko Susilo mengeluarkan surat perintah yang memerintahkan Teddy Rusmawan dan Sumardi untuk melaksanakan kunjungan di Pabrik dan Pengecekan Gudang Penitipan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 di Bandung.

Tanggal 4 Juli 2011, Teddy Rusmawan bersama-sama dengan Budi Santoso melakukan pengecekan ulang ke gudang PT CMMA dan ternyata benar kotak untuk menyimpan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R- 2 masih banyak kosong dan Teddy Rusmawan marah kepada Sukotjo S. Bambang. Setelah peristiwa tersebut, kemudian dilakukan rapat yang dipimpin Budi Setyadi yang bersepakat untuk melaporkan Sukotjo S. Bambang ke Polisi dengan sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan guna melindungi Djoko Susilo yang telah memerintahkan melakukan pencairan anggaran pembayaran pekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 sebesar 100% padahal pekerjaan belum selesai. Setelah itu dibuat laporan hasil pengecekan barang alat UKP R-2 TA 2011 di Bandung dengan membuat tanggal mundur yaitu tertanggal 14 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Murtono selaku Ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang, padahal

sebenarnya Tim Pemeriksa tidak pernah melakukan pengecekan pada tanggal tersebut dan pengecekan baru dilakukan pada tanggal 24 Maret 2011 di Gudang Perakitan PT ITI Bandung dengan kesimpulan : Pada tabel Pengecekan Gudang Perakitan : Alat UKP R-2 Citra Motor SP (Sample) sebanyak 1 unit sesuai dengan Spektek dengan keterangan sebanyak 85 dalam proses pengerjaan, dan pada tabel pengecekan penyimpanan : UKP R-2 yang telah dikemas dalam peti sebanyak 200 unit sesuai dengan spektek dengan keterangan siap dikirim.

Adapun foto-foto yang disusun sebagai lampiran pada laporan hasil pengecekan barang alat UKP R-2 TA 2011 di Bandung tertanggal 14 Maret 2011 tersebut, sebenarnya foto-foto tersebut diambil pada saat dilakukan pengecekan pada tanggal di gudang PT CMMA di Bandung tgl 6 Mei 2011. Atas laporan hasil Pengecekan Barang Alat UKP R-2 TA 2011 di Bandung yang dibuat dengan tanggal mundur tersebut selanjutnya dibuat nota dinas yang diberi nomor dan tanggal mundur yaitu tertanggal 9 Maret 2011 perihal Laporan Hasil Pengecekan Barang UKP Driving Simulator R-2 tgl 14 Maret 2011 di Gudang PT CMMA Bandung Jawa Barat dari Murtono selaku ketua Tim Pemeriksa dan Penerima Barang kepada Djoko Susilo.

Selain itu dibuat juga BAPPM yang diberi Nomor dan tanggal mundur tertanggal 14 Maret 2011, padahal pada tanggal tersebut Tim Pemeriksa dan Penerima Barang belum melakukan Pengecekan di Gudang PT CMMA sehingga belum diketahui berapa jumlah produksi alat

Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 yang sudah jadi, alat tersebut sudah sesuai atau tidak dengan spektek, serta kelengkapan seluruhnya dalam kondisi baik atau tidak. Selanjutnya dibuat BAPPB Driving Simulator UKP R-2 Korlantas Polri 2011 yang diberi nomor dan tanggal mundur tertanggal 15 Maret 2011, padahal Tim Pemeriksa belum melakukan pengecekan di Gudang PT CMMA pada tanggal 14 Maret 2011 dan pengecekan baru dilakukan pada tanggal 24 sampai dengan 25 maret 2011, 18 April 2011, serta tanggal 6 Mei 2011.

Tanggal 19 Juli 2011, Budi Santoso dengan dalih untuk meyelesaikan pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011 kemudian mengambil alih manajemen PT ITI dari Sukotjo S. Bambang. September 2011 Tim Pemeriksa dan Penerima Barang pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 melakukan pemeriksaaan ulang ke gudang PT CMMA. Sampai dengan bulan Oktober 2011 PT CMMA baru dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 dan mendistribusikannya sebanyak 579 unit, sedangkan untuk pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 baru dapat diselesaikan dan didistribusikan sebanyak 556 unit.

Awal bulan Desember 2011, Budi Santoso (PT CMMA) mengajukan pencairan 100% anggaran untuk pembayaran pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 TA 2011 sebesar Rp.127.526.116.109,00 kepada Djoko Susilo kemudian Legimo membuat dokumen pengajuan

pencairan tersebut. Tanggal 6 Desember 2011 dana tersebut dicairkan, padahal pada kenyataannya pendistribusian Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-4 ke Polda diseluruh Indonesia baru selesai dilakukan pada bulan April 2012. Budi Santoso dalam pelaksanaan pekerjaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R-4 TA 2011 di Kantor Korlantas POLRI dengan cara menggelembungkan harga kontrak dan menyediakan barang yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang tersebut dalam kontrak, sehingga mengakibatkan pengeluaran keuangan negara cq. Korlantas POLRI yang tidak seharusnya dibayarkan sebesar Rp.122.000.000.000,00.

Rangkaian perbuatan Djoko Susilo dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku KPA atau kedudukannya selaku Kepala Korps Lalulintas Polri yang telah melanggar Hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan selaku KPA bersama-sama dengan Didik Purnomo selaku pejabat pembuat Komitmen dan Teddy Rusmawan selaku ketua Panitia Pengadaan serta bersama-sama dengan Budi Susanto selaku Direktur PT CMMA dan Sukotjo S. Bambang selaku Direktur PT ITI telah menguntungkan Djoko Susilo sebesar Rp. 32.000.000.000,00 serta menguntungkan orang lain atau suatu korporasi Didik Purnomo sebesar Rp. 50.000.000,00 Budi Susanto Rp.93.400.000.000,00 Sukotjo S. Bambang (PT ITI) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 PRIMKOPPOL Mabes Polri sebesar Rp. 15.000.000.000,00 Wahyu Indra P. sebesar Rp.500.000.000,00 Gusti

Ketut Gunawan sebesar Rp. 50.000.000,00 Darsian sebesar Rp. 50.000.000,00 dan Warsono Sugantoro alias Jumadi sebesar Rp. 20.000.000,00. Akibat perbuatan Djoko Susilo dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.145.000.000.000,00 atau setidaknya Rp.121.830.768.863,59 sesuai dengan Surat dari BPK tertanggal 27 Maret 2013 perihal penyampaian hasil investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan Driving Simulator R- 2 dan R-4 pada Korlantas Polri TA 2011.15

B. Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak memilih dan Dipilih Dalam Kasus Djoko Susilo ditinjau dari Pasal 38 KUHP (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)

1. Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik sebagai pidana tambahan

Hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan, yaitu diatur dalam Pasal 10 poin b Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga Pasal 18 huruf d Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila kita kembali mengamati ketentuan Pasal 10 poin b Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ada beberapa jenis Pidana Tambahan, yaitu :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.

Hal tersebut juga tertuang secara *lex specialis* dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

“...pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Kata tertentu dalam pencabutan hak berarti pencabutan itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak, hanya hak tertentu saja yang bisa dicabut. Apabila semua hak dicabut, akan membawa konsekuensi terpidana kehilangan semua haknya termasuk kesempatan untuk hidup.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :⁴⁴

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali

⁴⁴ Kumpulan Kitab Undang- Undang hukum KUH Perdata, KUH P, WIPRESS, hlm. 444

- pengawas, pengampu, atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anaknya sendiri;
 - 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pada Putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim yang mengadili perkara *aquo*, tidak menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik dan kemudian pada pengadilan tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan memperberat hukuman Djoko Susilo menjadi sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang kemudian diperkuat oleh putusan kasasi dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, SH., M.Si. telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair serta Tindak Pidana Pencucian Uang secara berkeseluruhan dan Gabungan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pertama dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo, S.H., M.Si. tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa;
8. Membebaskan terdakwa tersebut untuk memebayra biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Jika putusan tersebut dicermat lebih lanjut, maka ada beberapa jenis pidana yang dijatuhkan kepda terdakwa Djoko Susilo, yakni Pidana Penjara disertai Pidana Denda, kemudian pembayaran uang pengganti, dan terakhir yakni pencabutan hak- pihak tertentu, dalam hal ini pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan Publik.

Menganai Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara. Lebih jelasnya dalam KUHP mengatur tentang batas waktu pencabutan hak yang dapat dijatuhkan kepada terpidana. Seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1):

(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pencabutan hak tidak dapat dilakukan untuk selama-lamanya atau dilakukan secara permanen, kecuali mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pidana mati.

Dalam Amar putusan tersebut, hukuman yang dijatuhkan pada Djoko Susilo dalam hal pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, tidak mencantumkan berapa lama hak tersebut dicabut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 KUHP. Dalam hal ini, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu seharusnya mencantumkan berapa lama hak tersebut ditangguhkan. Karena hukuman penjara yang diterapkan pada Djoko Susilo bukan penjara seumur hidup atau hukuman mati melainkan penjara dalam waktu tertentu dimana dalam Pasal 38 KUHP menyebutkan bahwa Lamanya pencabutan hak pada pidana penjara ialah minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. Akibat tidak dicantumkan lamanya hak tersebut dicabut, maka dapat ditafsirkan bahwa Djoko Susilo tidak dapat menggunakan hak tersebut seumur hidup meskipun telah selesai menjalani masa hukuman.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana dapat dicabut semuanya. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak hidup, hak sipil (perdata), dan hak

ketatanegaraan. Terdapat dua hal tentang pencabutan hak-hak tertentu, yaitu⁴⁵

- a. Tidak bersifat otomatis, harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- b. Tidak berlaku seumur hidup, ada jangka waktu tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan putusan hakim.

Selain bertentangan dengan Pasal 38 KUHP, Penjatuhan Pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam perkara *aquo*, tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU-VII/2009 terkait dengan syarat dalam pemilihan umum yaitu “...*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih...*” yang merupakan norma inkonstitusional bersyarat. Norma hukum tersebut adalah inkonstituonal apabila tidak dipenuhi syarat-syarat berikut :

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected official*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara

⁴⁵ Evi Hartanti, op.cit, hlm. 65

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, poin 2 menyatakan bahwa setelah terpidana menjalani hukumannya selama 5 tahun atau lebih, bisa mencalonkan kembali dalam pemilihan umum setelah melalui masa jeda 5 (lima) tahun. Artinya, pencabutan hak kepada terpidana yang telah menjalani masa hukuman, hanya sampai pada batas 5 (lima) tahun saja. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 38 KUHP, dimana terdakwa hanya boleh dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.

Perlu diingat bahwa pelaku korupsi tetap berhak atas keadilan betapapun besar kesalahannya. Tidak dibenarkan jika tuntutan pemidanaan semata-mata atas rasa kebencian dan mengesampingkan keadilan. Pada kasus Djoko Susilo ini, hal yang lebih ditekankan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK dan dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis adalah efek jera. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta yang mengadili perkara *aquo*, bahwa:

“Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus objektif , tidak boleh terindikasi dari pihak lain, apalagi dengan opini publik. Dalam Kasus Djoko Susilo, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan

dipilih dalam jabatan publik terkesan berlebihan, saya rasa dengan dijatuhkannya hukuman penjara yang sangat lama akan terseleksi dengan sendirinya dimasyarakat. Walaupun memang pada prinsipnya pelaku korupsi harus dimiskinkan”

Menurut Hakim yang mengadili perkara *Aquo* pada pengadilan tingkat pertama bahwa walaupun tidak dijatuhkan pidana tambahan kepada Djoko Susilo berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, masyarakat dapat menilai dengan sendirinya mengenai pantas atau tidaknya mantan terpidana menduduki sebuah jabatan. Namun, hal tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Hakim yang mengadili perkara *Aquo* pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam wawancaranya dengan penulis bahwa :

“Suatu hal dimasyarakat kita adalah ada gejala mudahnya lupa terhadap sesuatu, jadi jika ada terpidana yang telah menjalani hukuman, masyarakat lupa bahwa orang itu pernah mencederai kepercayaan rakyat dan tidak amanah dalam menjalani tugasnya sebagai pejabat publik, salah satunya ialah tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif untuk menghindari hal tersebut, maka dikeluarkanlah putusan pengadilan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih sebagai jaminan bahwa terpidana yang telah menjalani hukuman, tidak dapat mencalonkan lagi sebagai pejabat publik”

Pada dasarnya penulis sependapat dengan pernyataan diatas bahwa seorang pejabat publik yang telah menjadi terpidana, tidak diperkenankan

untuk memegang kekuasaan sebagai pejabat publik, akan tetapi perlu diingat bahwa pada hakikatnya manusia hidup dalam sebuah proses dimana dapat berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, Seseorang boleh saja dicabut hak politiknya, dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, namun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku, yaitu menentukan batasan waktu pencabutan hak.

Menurut Roeslan Saleh masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk Undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Salah satu contohnya adalah pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena disebabkan malpraktik. Hal tersebut dimaksudkan agar kejahatan serupa tidak diberlakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.⁴⁶

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Angka (3) berbunyi : “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan” . Dengan adanya jaminan hak tersebut, maka penerapan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih yang tidak ditentukan batas waktunya seperti pada Putusan yang ditujukan kepada terdakwa Djoko Susilo dapat dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Walaupun pada Klasifikasinya, Hak memilih dan Dipilih dalam Jabatan Publik termasuk Hak *Derogable*

⁴⁶ Roeslan Saleh. *Stetsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta; Yayasan Badan Penerbit Gajahmada, 1960. Hal 19.

*Rights*⁴⁷ atau hak yang bisa dilanggar, namun dalam penerapannya, harus diberikan batas waktu ditanggungkannya hak tersebut.

Jika bercermin dari teori tujuan pemidanaan yang dianut oleh Hegel, Herbart, Kant, Stahl, von Bar Kohler, dan Leonard Polak yang menjunjung tinggi teori absolut dimana dalam teorinya mengatakan bahwa penjatuhan pidana bertujuan sebagai pembalasan, namun pada hakikatnya, penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk itu, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Mengayomi masyarakat terlebih kepada terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi tersebut disebut dengan konsepsi pemasyarakatan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan Pasal 3 yang berbunyi “sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab ”

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa dalam menjalani hukuman, Lembaga Pemasyarakatan melakukan binaan dengan membentuk narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana

⁴⁷ *Derogable Rights* adalah hak – hak hak-hak yang masih dapat ditanggungkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara dalam kondisi tertentu.

sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Terkait dengan hal tersebut, maka sepatutnya dalam pemberian hukuman, terpidana diberikan batasan-batasan tertentu, tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan dalam hal ini pencabutan hak-hak tertentu yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik pada kasus Djoko Susilo.

C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014)

1. Pertimbangan Hakim

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan Publik kepada Terdakwa Djoko Susilo, terlebih dahulu penulis menjabarkan pertimbangan hakim pada tingkatan pertama dimana dalam putusannya dinilai tidak memberikan efek jera dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, maupun negara.

Pada tingkatan pertama, Majelis Hakim yang mengadili perkara *Aquo*, hanya menjatuhkan hukuman dengan 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut dicabutnya hak memilih dan dipilih

terdakwa Djoko Susilo dengan pertimbangan bahwa pencabutan hak tersebut dipandang berlebihan, mengingat terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif lama, maka menurut Majelis hakim dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada didalam organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar Terdakwa akan menggunakan hak konstitusinya untuk kegiatan politik.

Selain pertimbangan diatas, dalam menentukan lamanya pidana penjara kepada terdakwa Djoko Susilo, Majelis Hakim dalam putusannya menimbang bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seharusnya memperhatikan dari segala aspek baik bagi kepentingan masyarakat, negara, maupun kepentingan Terdakwa sendiri dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, mengingat pemidanaan bukanlah sebagai instrumen untuk balasa dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi ada kandungan efek jera terhadap pembelajaran masyarakat dan lebih dari itu adalah untuk menjadi momentum bagi Terdakwa agar dimasa yang akan datang dapat memperbaiki perbuatan-perbuatannya, sehingga kedepan pada diri terdakwa akan menjadi warga negara yang lebih berintrospeksi ketika kembali ditengah masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya Pada tingkatan Kasasi, Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*, hanya sekedar memperbaiki mengenai ketentuan barang

bukti yang telah ditetapkan pada Putusan sebelumnya, yakni putusan pada tingkat Banding. Adapun mengenai beratnya hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa Djoko Susilo, sama halnya yang telah ditetapkan pada Putusan Tingkat Banding. Dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi II/Terdakwa Djoko Susilo dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengenai Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, mengacu pada pertimbangan hakim dalam tingkat Banding, yakni Putusan Nomor 36/PID/TPK/2013/PTDKI tanggal 15 Desember 2013 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta.

Adapun beberapa pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara *aquo*, adalah sebagai berikut :

Menimbang tentang Ad. 3 keberatan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam Memori Bandingnya menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak menjatuhkan putusan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih, karena sesungguhnya pencabutan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 10 huruf b angka 1 KUH Pidana. Tujuan Hukuman Tambahan yang diajukan Pembanding agar seseorang yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tidak lagi diberi kesempatan memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan korupsi dan KKN,

sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum KPK tersebut dapat diterima karena sesungguhnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan Pencabutan Hak-Hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, dilakukan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi terutama dalam perkara tindak pidana korupsi skala besar, yang menimbulkan kerugian Negara sangat besar dan korupsi yang dilakukan dengan cara-cara yang vulgar. Bahwa terdakwa/ Pembanding melakukan Tindak Pidana Korupsi justru di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK tentang pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini sebagai hukuman tambahan yang dijatuhkan oleh Hakim dengan memperhatikan sifat dari kejahatan dan kerusakan yang terjadi di sistem Korlantas Mabes Polri sebagai akibat perbuatan terdakwa dan dampak perbuatan Terdakwa ditengah-tengah masyarakat sangat luas, runtuhnya kehormatan Lembaga penegak hukum. Kasus Korlantas yang melibatkan terdakwa sebagai aktor utama terdakwa beserta aktor-aktor lainnya telah menimbulkan keprihatinan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kasus ini menyita perhatian masyarakat agar pelaku dihukum sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pemberitaan publik atas kasus Korlantas ini menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan terdakwa adalah kasus besar yang menarik perhatian masyarakat luas.

Menimbang bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan Indonesia saat ini sedang darurat korupsi, karena korupsi bukannya semakin berkurang namun semakin bertambah liar dan tidak terkendali di hampir semua sektor kehidupan Negara. Selain itu korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mempunyai dampak demoralisasi yang besar, sehingga hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu untuk menimbulkan efek jera.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sangat sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum KPK yang mengajukan Tuntutan

pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan didipilih dalam jabatan publik ini sebagai pidana tambahan, namun harus ada parameter yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan tuntutan pencabutan ini, yaitu terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sangat besar dan pencucian uang yang sangat besar pula. Kasus yang melibatkan Terdakwa adalah kasus besar bilaman dilihat dari jumlah kerugian Negara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang merupakan gabungan beberapa tindak pidana korupsi dan pencucian uang, serta implikasinya kepada masyarakat ditambah lagi status dan jabatan terdakwa selaku Ka Korlantas yang juga sebagai seorang perwira tinggi polisi dan penegak hukum. Bahwa Undang-undang memberikan otoritas kepada Hakim melalui putusannya, dapat mencabut hak-hak yang ditentukan Undang-undang, seperti memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum yang maknanya sama dengan untuk mendapatkan jabatan publik. Selain itu bahwa tujuan pemidanaan selain ntuk menimbulkan efek jera juga dalam rangka tindakan preventif ke depan, untuk mencegah orang orang yang telah dijatuhi hukum pidana karena melakukan tindak pidana korupsi dipastikan tidak boleh lagi meraih jabatan publik setelah selesai menjalani masa hukuman. Bahwa saat ini banyak pejabat-pejabat terpidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman pidana dan setelah menjalani masa hukuman, kembali berhasil menduduki jabatan publik, namun kemudian mengulangi kejahatannya melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi menimbulkan kerusakan besar bagi Negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan hancurnya perekonomian nasional.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan terseut diatas, Pengadilan Tinggi dalam Pemeriksaan perkara ini di tingkat banding dapat menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, agar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang dijatuhi pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini sebagai hukuman tambahan.

Selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo, menyebutkan berbagai alasan yang memperberat hukuman bagi terdakwa Djoko Susilo, antara lain :

1. Terdakwa telah mencoreng nama baik institusi lembaga Kepolisian RI, Terdakwa tidak menjaga kehormatan institusi Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan penyesalan dan selalu membantah menerima uang meskipun aliran uang jelas mengalir kepada Terdakwa, dimana terdakwa terbukti menerima aliran dana sebesar Rp32.000.000.000; (tiga puluh dua miliar rupiah), yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar;
3. Bahwa terdakwa sebagai salah satu perwira tinggi dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi, termasuk dalam jajaran pimpinan Polri, karena itu sebagai pimpinan Terdakwa seharusnya memiliki martabat dan kehormatan diri dengan mengabdikan diri kepada kepentingan bangsa bukan mencari keuntungan dan memperkaya diri sendiri dari jabatan yang diembannya dan menumpuk kekayaan dalam jumlah yang sangat besar dan fantastis secara illegal. Terbukti bahwa harta kekayaan terdakwa yang disita penyidik KPK sangat besar, hal ini menunjukkan keserakahan terdakwa;

4. Bahwa kasus proyek pengadaan driving simulator R-2 DAN r-4 mengakibatkan dampak sosial yang sangat besar, yang sangat merugikan masyarakat, kemudian sempat menimbulkan konflik kelembagaan antara institusi Polri dengan KPK, yang mengakibatkan presiden harus turun tangan menyelesaikannya secara kelembagaan pula;
5. Bahwa negara menyediakan dana untuk proyek pengadaan simulator R-2 dan R-4 untuk memutus mata rantai percaloan pengurusan SIM. Fungsi alat ini juga untuk mendidik masyarakat mematuhi hukum dalam menggunakan kendaraan di jalan raya, agar korban manusia tidak semakin banyak meninggal secara sia-sia, akibat kecelakaan di jalan raya. Seua tujuan yang diharapkan dari proyek ini menjadi terbengkalai akibat perbuatan terdakwa, sasaran yang diharapkan pemerintah tidak tercapai.

Dari berbagai pertimbangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko susilo lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Intinya adalah terdakwa yang telah menjalani hukuman khususnya yang dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak lagi menggunakan haknya untuk menduduki jabatan publik.

Secara Filosofis, sesungguhnya penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya preventif dan menjadi manifestasi dari upaya penegak hukum dalam mewujudkan cita-cita luhur dari pemidanaan atau pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan yaitu keadilan.

Menurut Artidjo Alkostar, Pencabutan hak politik dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak bisa diterapkan kepada semua terdakwa, tergantung pada posisi jabatannya, sifat kejahatannya, dan sejauhmana dampaknya bagi publik. Terkait dengan pendapat tersebut, pencabutan yang diterapkan kepada Djoko Susilo sesungguhnya sangatlah tepat. Pertama, dilihat dari jabatannya, Djoko Susilo merupakan salah perwira tinggi Inspektur Jendral Polri, adalah hal yang sangat tidak wajar melakukan perbuatan korupsi. Kedua, dari sifat kejahatannya, kita semua tahu bahwa korupsi merupakan *extraordinary crime*, yaitu suatu kejahatan yang luar biasa, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga, tentang sejauhmana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Perlu diketahui bahwa dalam pertimbangan hakim pada Pengadilan Tinggi jakarta menyebutkan dampak perbuatan Terdakwa ditengah-tengah masyarakat sangat luas, yaitu runtuhnya kehormatan Lembaga penegak hukum.

Beberapa kalangan yang kontra atau tidak setuju terhadap dijatuhkannya pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada narapidana korupsi, bagi mereka pencabutan hak tersebut termasuk pelanggaran HAM yang telah diatur secara konstitusional. Hal itu masih terbantahkan, sebab setiap hukuman atau pemidanaan pada dasarnya memang pelanggaran HAM, tetapi pelanggarannya diperbolehkan, sepanjang berdasarkan Undang-undang. Hal demikian juga berlaku dalam pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, yang dibenarkan berdasarkan Pasal 10 huruf b, Pasal 35, dan Pasal 38 KUHP. Secara *lex spesialis* juga diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 201 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, Hakim harus mempertimbangkan sebab dan akibat dari putusan yang akan dijatuhkannya. Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Hakikatnya, teori pemidanaan tersebut ditransformasikan melalui kebijakan pidana (*criminal policy*) pada kebijakan legislatif.⁴⁸

Penulis menyadari, bahwa instrument pidana dengan sanksi yang tegas memang bukanlah satu-satunya upaya yang dapat menanggulangi dan memberantas korupsi. Namun mengenai ringan beratnya sanksi tetap

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal 128.

memberikan pengaruh besar terhadap upaya pencegahantindak pidana dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemberian efek jera (*deterrent effect*) dan daya segah (*preveny effect*) itu dimaksudkan bahwa melalui pemeberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek *prevensi general* yaitu masyarakat akan berusaha menaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping itu, hal ini juga dilakukan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi (*prevensi special*).

Hukum memang seharusnya tidak pandang bulu, karena keadilan haruslah tegak melalui hakim sang juru pengadil. Bukan demi sebuah popularitas dan tujuan membalas, namun demi terwujudnya tatanan moral yang hakiki dan tidak mencederai hak asasi manusia.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Penerapan Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537/Pid.Sus/2014 yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko Susilo adalah kurang tepat, karena tidak sesuai dengan pasal 38 KUHP. Pada Pasal 38 Kuhp ditegaskan bahwa lamanya pencabutan hak pada pidana penjara atau kurungan yakni minam dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Sedangkan dalam perkara *Aquo*, Majelis Hakim tidak menentukan lamanya pencabutan hak kepada terdakwa, dimana dapat ditafsirkan Djoko Susilo tidak dapat menggunakan hak tersebut seumur hidup meskipun telah selesai menjalani masa hukuman . Pada dasarnya, penulis setuju dengan adanya pencabutan hak tersebut, namun dalam putusannya, tidak disebutkan mengenai lamanya pencabutan tersebut ditanggihkan, sehingga menurut penulis hal tersebut dapat mencederai Hak Asasi Manusia.
2. Parameter Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Djoko susilo lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di

negara Indonesia. Intinya adalah terdakwa yang telah menjalani hukuman khususnya yang dalam perkara tindak pidana korupsi, tidak lagi menggunakan haknya untuk menduduki jabatan publik. Pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik dibenarkan berdasarkan Pasal 10 huruf b, Pasal 35, dan Pasal 38 KUHP. Secara *lex spesialis* juga diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Saran

1. Dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, seharusnya memiliki syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dinilai dari sifat kejahatannya, dll. Selain itu, istilah Jabatan Publik yang terdapat dalam rumusan Pasal 35 KUHP yakni Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dalam pengertiannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan yang dapat menjabarkan definisi dari jabatan publik tersebut.
2. Mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dalam jabatan publik, sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan. Tujuan utama dilakukannya pencabutan hak ini ialah agar terdakwa yang telah menjalani hukuman, tidak mencalonkan lagi atau tidak berwenang lagi memegang jabatan publik. Hal tersebut tidak ada relevansinya jika hak memilih juga ditangguhkan, bahkan cenderung

melanggar Hak Asasi Manusia karena hak memilih hanyalah hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau menyalurkan aspirasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan International*, Rajawali Pers:Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama Bandung
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, sinar grafika.
- Ey. Kanter dan R. Sianturi, 1982 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- Fockema Andreae, Kamus Hukum,. (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina cipta
- Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana*, 2004, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hadiati, Hermin. 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Kumpulan Kitab Undang- Undang hukum KUH Perdata, KUH P, WIPRESS
- Moeljatno, *KUHP* (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), cet. Ke-20, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Nini Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- P.A.F., Lamintang 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung.
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika;Jakarta.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.1976.
- Roeslan Saleh. *Stetsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta; Yayasan Badan Penerbit Gajahmada, 1960.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*,Armico,Bandung.
- SR.Sianturi,1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.
- Sudding, Sarufuddin. 2014, *Perselingkuhan Hukum dan Politik Dalam Negara Demokrasi*, Rangkang Education;Yogyakarta.
- Tim Pustaka Merah Putih, 2007, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Galangpres, Yogyakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang- undang Nomor 1 tahun 1946 (Kitab Undang- undang Hukum Pidana)
- Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet

<https://reazaoktafiansyah.wordpress.com/2014/04/19/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu> diakses pada 06 Desember 2015 pukul 21.21 WITA

http://www.kompasiana.com/www.rolastampubolon.wordpress.com/korupsi-merupakan-extra-ordinary-crime_552c09f76ea8341e2f8b4581 diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 21.07 WITA



PENGADILAN NEGERI NIAGA/HAM/TPKOR /H.I. JAKARTA PUSAT
Jalan. Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Jakarta Pusat
Email. info@pn-jakartapusat.go.id

Nomor : W10.U2.22.PMH.III.2016.05. Jakarta, 04 Maret 2016.
Lamp : ---
Hal : Surat Keterangan Rizet.

SURAT KETERANGAN :

Kami Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, di Jakarta Menerangkan :

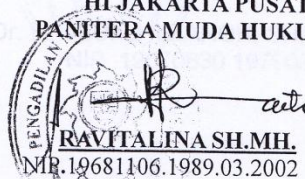
NAMA : Siti Nurkholisah
NIM : B111 12 257
Universitas : Hasanuddin
Fakultas : Ilmu Hukum.
Alamat : Kampus Unhas Tamalanrea jalan Perintis Kemerdekaan
Makasar 90245

Benar telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, dalam rangka mengumpulkan data-data dan wawancara di Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, sebagai Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ Tinjauan Yuridis terhadap pencabutan hak memilih dan dipilih dalam Jabatan public sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi”.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n.KETUA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HAM/TIPIKOR DAN
HI JAKARTA PUSAT.
PANITERA MUDA HUKUM,


RAVITALINA SH.MH.
MR.19681106.1989.03.2002



PENGADILAN TINGGI JAKARTA

JALAN LETNAN JENDRAL SUPRAPTO, JAKARTA PUSAT 10510
TELEPON / FAKSIMILE : 021-4252069 / 021-4254257

SURAT KETERANGAN

Nomor : W10-U / 1460 /Kp.01.2/3/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Siti Nurkholisah
NIS : B 111 12 257
Universitas : Hasanuddin
Fakultas : Ilmu Hukum

telah datang ke Kantor Pengadilan Tinggi Jakarta dalam rangka mengumpulkan data dan wawancara guna melengkapi penulisan Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Memilih dan Dipilih Dalam Jabatan Public Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 Maret 2016
PANITERA,

Dr. H. TEUKU ILZANOR, SH, SE., M.Hum
NIP. 19570830 197903 1 003

W10.U/FORM-004/SOP/027/KPG/2015

MAHKAMAH AGUNG RI

Jl. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13
Telp. 3843348-3843459-3843541-3843557-3845793
3844302-3451173-3812347-3457624-3457642

TROMOL POS NO. 1020
JAKARTA 10010

Jakarta, 14 March 2016

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 01 /PidSus/III/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, Panitera Muda Perkara Pidana Khusus
Mahkamah Agung – RI menerangkan bahwa :

Nama	:SITI NURKHOLISAH
NIM	:B111 12 257
Program Kekhususan	:ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Mahasiswa	:UNIVERSITAS HASANUDDIN

Telah melakukan riset/penelitian ilmiah guna mencari bahan untuk
penyusunan SKRIPSI berjudul :

**“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN HAK MEMILIH
DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIC SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

U.B.

KOORDINATOR PIDANA KHUSUS


EDO NUGROHO, SH.MH

NIP.1965 1009 1987 031 004